

## **DIASPORA & HYBRIDITY: EKSPLOKASI WUJUD KREATIVITAS ETNIS TIONGHOA-BALI DALAM PERSPEKTIF POSTKOLONIALISME**

**Freddy Hendrawan<sup>1)</sup>, Gilang Permana Putra<sup>2)</sup>**

<sup>1) 2)</sup> Institut Desain dan Bisnis Bali

### **ABSTRACT**

*Discourses related to the interrelationship between minority and majority communities are inextricably interwoven to postcolonialism studies. This qualitative-descriptive-narrative article explores forms of ethnic Chinese-Balinese creativity in Bali in reconstructing their cultural identity oriented to the ancestral homeland through diaspora and hybridity frameworks. Along with the disperse of Chinese people through the process of migration embedded their tangible and intangible cultures, included in the negotiation process socio-culturally and politically to express, preserve, and maintain their minority identity by adopting Balinese traditional cultures into person names, ritual practices, and Tri Dharma temple's architectures. Ultimately, this negotiation process generates a hybrid identity as a form of creativity. It has echoed Hall's way of thinking that cultural identity is 'not once-and-for-all'; it emphasizes the differences instead of fixed identities as culture is dynamic and fluid.*

Keywords: Bali, diaspora, hybridity, Chinese, postcolonialism

### **ABSTRAK**

*Wacana-wacana tentang hubungan sosial antara kelompok-kelompok minoritas dan mayoritas memiliki kaitan erat dengan kajian-kajian postkolonialisme. Artikel kualitatif-deskriptif-naratif ini bertujuan melakukan eksplorasi terhadap wujud-wujud kreativitas etnis Tionghoa-Bali dalam merekonstruksi identitas budaya mereka yang berorientasi pada ancestral homeland melalui kerangka diaspora dan hybridity. Seiring penyebaran etnis Tionghoa melalui proses migrasi melekat pula kebudayaan tangible dan intangible, yang kemudian diikutsertakan ke dalam proses negosiasi secara sosial-budaya dan politik dalam rangka mengekspresikan, melestarikan, dan memelihara identitas minoritas mereka dengan mengadopsi budaya-budaya tradisional Bali ke dalam penggunaan nama, praktek-praktek ritual, dan arsitektur kuil Tri Dharma. Pada akhirnya, proses negosiasi ini menciptakan sebuah identitas hibrid sebagai sebuah bentuk kreativitas. Hal ini sependapat dengan cara berpikir Hall mengenai identitas budaya yang tidak sama untuk semua; menekankan pada perbedaan dibandingkan identitas tetap sebagai akibat dari karakteristik budaya yang dinamis dan mengalir.*

Kata Kunci: Bali, diaspora, hybridity, tionghoa, postkolonialisme

### **PENDAHULUAN**

Fenomena migrasi pada awalnya dipahami sebagai sebuah perpindahan seseorang atau kelompok orang yang terbatas pada perbedaan geografis. Kini, istilah ini telah mengalami perkembangan ke dalam perspektif yang lebih kompleks, mencakup wacana ekonomi, politik, teknologi, hingga komunikasi. Berbagai faktor pendorong dan penarik dalam fenomena migrasi telah banyak dipaparkan oleh para peneliti (Butler, 2001; Chee-Beng, 2007; Clifford, 1994; Papastergiadis, 2000), bahkan proses konstruksi kehidupan sosial dan konflik yang terjadi antara diaspora dan tempat tujuan atau negara tuan rumah menjadi

sorotan utama dalam perspektif postkolonial (Cohen and Sheringham, 2008; Pasura, 2018; Dickinson, 2018). Salah satunya adalah adanya dikotomi antara kelompok masyarakat diaspora sebagai minoritas dan kelompok masyarakat lokal sebagai mayoritas yang melibatkan praktik hegemoni. Konsep dikotomi ini dijelaskan oleh Said (2003) sebagai pandangan Orientalisme yang membentuk struktur masyarakat ke dalam dua kelompok yang berlawanan (*binary opposition*), dimana kelompok minoritas dipahami sebagai kaum yang tertindas dan kelompok mayoritas sebagai kaum yang berkuasa dan berhak melakukan penindasan. Isu-isu inilah yang dikatakan sebagai bentuk-bentuk praktek imperialisme yang ditentang dan dikaji di dalam perspektif postkolonialisme.

Indonesia telah mengalami praktek imperialisme oleh pemerintah kolonial Belanda melalui kebijakan pemisahan struktur sosial kemasyarakatan menjadi tiga golongan (*tripartite*), yaitu golongan Eropa, *Foreign Orientals*, dan pribumi. Segregasi kelompok sosial ini kemudian menjadi cetak biru (*blueprint*) pemerintah Indonesia sejak pasca kemerdekaan, yaitu dengan memisahkan identitas kelompok pribumi dan non-pribumi, walaupun sebagian besar kelompok non-pribumi ini telah menetap dan berbaur dengan budaya lokal, bahkan melakukan pernikahan dengan masyarakat pribumi yang melahirkan generasi campuran (*mixed parentage*) (Coppel, 2002). Etnis Tionghoa adalah salah satu kelompok masyarakat diaspora di Indonesia yang mengalami diskriminasi secara sosial dan politik sejak pemerintahan kolonial Belanda hingga saat ini di dalam level yang bervariasi (Coppel, 1983).

Sebagai kelompok minoritas, etnis Tionghoa di Indonesia telah menciptakan lingkungan binaan melalui proses negosiasi dengan budaya lokal. Etnis Tionghoa masih memiliki ikatan kuat terhadap tempat asal leluhurnya (*ancestral homeland*), terutama kelompok generasi awal (*Tionghoa Totok*) berdasarkan pengalaman dan memori mereka saat tinggal di tempat asal. Ikatan terhadap *ancestral homeland* pada kelompok generasi berikutnya (*Tionghoa Peranakan*) adalah didasarkan pada tradisi pendahulunya dan cenderung memudar karena kelompok ini telah mengadopsi lingkungan dan budaya lokal dimana mereka dilahirkan dan dibesarkan. Walaupun demikian, kedua generasi ini telah melakukan proses negosiasi dengan budaya mayoritas melalui proses rekonstruksi sebuah teritori yang mengkombinasikan budaya *ancestral homeland* dan budaya tuan rumah. Proses ini dapat dikatakan sebagai salah satu upaya kreatif kelompok diaspora Tionghoa untuk mempertahankan budaya leluhur mereka sekaligus respon terhadap budaya lokal melalui proses akulturasi yang melahirkan identitas budaya hibrid.

Pembentukan identitas budaya hibrid oleh kelompok diaspora Tionghoa di Bali dapat dieksplor melalui wujud sosial-budaya, ritual, dan arsitektur. Artikel kualitatif-deskriptif ini mengeksplor wujud-wujud kreativitas budaya etnis Tionghoa di Bali dengan menggunakan pendekatan kajian postkolonialisme dalam memberikan wawasan tentang fenomena silang-budaya dalam kerangka diaspora dan *hybridity*.

## **METODOLOGI**

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan eksplorasi secara deskriptif-naratif terhadap wujud-wujud kreativitas budaya etnis Tionghoa di Bali yang menciptakan identitas budaya hibrid. Wacana mengenai diaspora dan *hybridity* sangat erat kaitannya dengan fenomena globalisasi di era postmodern, dan termasuk ke dalam kajian postkolonialisme.

## **POSTKOLONIALISME, DIASPORA, DAN HYBRIDITY**

Kajian postkolonialisme pada dasarnya muncul sebagai sebuah upaya perlawanan terhadap isu-isu penindasan, diskriminasi, dan eksploitasi baik dalam konteks sosial maupun politik. Said (2003) sebagai salah satu tokoh utama dalam kajian

postkolonialisme menjelaskan mengenai konsep Orientalisme yang membagi kelompok sosial menjadi “*the Orient*” sebagai kelompok penguasa sekaligus penindas dan “*the Occident*” sebagai kelompok bawahan dan sekaligus sebagai yang tertindas, dianggap sebagai salah satu bentuk praktik imperialisme (1994) pada era kolonial. Tetapi, kenyataannya di era kontemporer saat ini, praktik serupa masih ditemukan, terutama di dalam lingkungan sosial yang melibatkan kelompok-kelompok minoritas sebagai golongan marginal.

Isu-isu tentang marginalitas erat kaitannya dengan wacana diaspora. Secara sederhana, diaspora dapat didefinisikan sebagai perpindahan atau penyebaran individu atau kelompok dari tempat asalnya, salah satunya melalui fenomena migrasi. Kelompok masyarakat diaspora kerap dianggap sebagai ‘*the Other*’ oleh kelompok mayoritas. Hal ini dikarenakan budaya, pandangan hidup, maupun tradisi mereka yang dianggap berbeda dengan kelompok mayoritas atau konsep nasionalis sebuah negara. Seiring dengan perpindahan kelompok masyarakat diaspora yang melampui aspek geografis, melekat pula warisan budaya tradisional mereka baik berupa wujud benda (*tangible*) maupun tak benda (*intangible*). Dalam rangka mempertahankan dan memelihara kebudayaan yang berorientasi pada *ancestral homeland*, maka dilakukan upaya negosiasi untuk merekonstruksi identitas budaya mereka. Proses negosiasi ini tentunya bukan hal yang mudah bagi kelompok masyarakat diaspora, sehingga diperlukan upaya kreatif dengan mengadopsi elemen-elemen budaya kelompok mayoritas agar menjadi kompatibel, sehingga menciptakan identitas budaya hibrid.

Istilah hibrid secara umum digunakan di bidang Biologi (hibrida) dan dipahami sebagai hasil persilangan varietas atau spesies hidup. Istilah ini kemudian mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas, terutama dalam kajian postkolonialisme. Dalam wawancaranya bersama Rutherford (1990), Bhabha menekankan istilah hibrid sebagai sebuah ruang transisi (*liminal*) yang terjadi karena pertemuan dua budaya sehingga melahirkan kebaruan identitas (*newness identity*). Dalam kaitannya dengan diaspora, identitas hibrid tercipta melalui proses rekonstruksi sosial karena kesadaran kelompok masyarakat diaspora dalam menempatkan posisi mereka sebagai kelompok minoritas.

## ETNIS TIONGHOA DI BALI

Sejarah kehadiran etnis Tionghoa di Bali telah dibuktikan melalui bukti-bukti arkeologis dan dokumen-dokumen sejarah lainnya (Nordholt, 2010; Ardika, 2009; Hauser-Schäublin and Ardika, 2016). Diawali dengan perkembangan aktivitas perdagangan dan komersil di Nusantara, terjadilah proses migrasi etnis Tionghoa dari berbagai provinsi di *China* dengan tujuan mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Sebagian besar dari mereka memilih untuk menetap dekat dengan pelabuhan di Bali Utara dan Selatan, bekerja sebagai pedagang atau pengawas pelabuhan. Sebagian lainnya menyebar ke area perkotaan dan perdesaan memilih bekerja sebagai pedagang di pasar-pasar tradisional dan sebagai petani.

Dalam sejarah politik Indonesia, khususnya di era Order baru, eksistensi etnis Tionghoa sebagai kelompok masyarakat diaspora telah dianggap sebagai ‘*the Other*’ dengan memarginalkan identitas budaya mereka untuk dipraktikan di ranah publik. Tetapi kebijakan asimilasi pemerintah Indonesia ini cenderung ambivalen. Walaupun pemerintah Indonesia melarang etnis Tionghoa mempraktikan segala bentuk budaya tradisional *China* secara terbuka, etnis Tionghoa diberikan toleransi untuk mempraktikannya secara tertutup terbatas pada kalangan individu, keluarga, atau kelompok kecil. Selain itu, dengan adanya kebijakan asimilasi ini, banyak etnis Tionghoa mendaftarkan dirinya pada salah satu dari lima agama resmi Indonesia, terutama dengan tujuan untuk melengkapi identitas agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Tetapi hal ini tidak menyurutkan sebagian besar etnis Tionghoa untuk tetap mempraktikkan praktik ritual yang berorientasi pada tradisi *ancestral homeland*.

Etnis Tionghoa telah menetap di Bali dari generasi ke generasi dan berbaur dengan masyarakat lokal. Bahkan tidak jarang dijumpai terjadi perkawinan antara etnis Tionghoa dan Bali, melahirkan generasi dengan identitas hibrid, Tionghoa-Bali. Identitas hibrid ini diikuti dengan perpaduan sosial-budaya yang dapat dilihat pada penggunaan nama, praktik ritual, dan arsitektur. Salah satu faktor terjadinya perpaduan budaya ini adalah adanya kompatibilitas antara Agama Hindu-Bali dengan kepercayaan tradisional etnis Tionghoa, sehingga banyak etnis Tionghoa-Bali mencantumkan agama Hindu-Bali pada kolom agama di KTP.

## WUJUD KREATIVITAS ETNIS TIONGHOA-BALI

Proses negosiasi oleh etnis Tionghoa terhadap budaya Bali sebagai upaya memelihara warisan budaya leluhur dan sekaligus agar diterima di dalam lingkungan binaan yang multikultur dilakukan secara kreatif. Wujud kreativitas etnis Tionghoa-Bali ini dapat dilihat pada aspek penggunaan nama, praktik ritual, dan arsitektur.

### 1. Penggunaan nama

Penggunaan nama kombinasi dengan karakteristik *China* dan Bali terjadi sebagai akibat adanya perkawinan antara dua kebudayaan ini. Kombinasi nama ini biasanya digunakan tidak hanya oleh pasangan suami istri dari dua kebudayaan ini, tetapi juga diwariskan kepada anak-anak mereka. Contohnya, I Putu Liong, Tjik De, atau I Wayan Encik. Selain akibat dari perpaduan budaya, kombinasi nama ini kemungkinan terjadi karena kebijakan asimilasi dari pemerintah Indonesia pada era Order Baru untuk meng-'Indonesiakan' etnis Tionghoa dengan mengganti nama mereka menjadi nama yang lebih terdengar atau memiliki karakteristik Indonesia atau yang tidak merepresentasikan identitas *China*. Menurut Suryadinata (2008; 2014), kebijakan untuk mengganti nama ini kurang jelas karena tidak ada definisi jelas yang dimaksud dengan 'nama Indonesia', sehingga banyak etnis Tionghoa mengadopsi nama-nama populer dalam Bahasa Sansekerta, Bahasa Inggris (*Western*), atau Bahasa Daerah dimana etnis Tionghoa ini tinggal.

### 2. Praktik ritual

Praktik-praktik tradisi pemujaan terhadap leluhur dan kombinasi tiga aliran kepercayaan (Konfusianisme, Taoisme, dan Buddhisme) masih dilakukan oleh sebagian besar etnis Tionghoa di Bali. Dalam menjalankan ritual sehari-hari atau perayaan tertentu, mereka menyelaraskannya dengan menggunakan *canang* sebagai media persembahan kepada leluhur dan dewa dewi. *Canang* adalah salah satu bentuk persembahan yang dihaturkan kepada dewa dewi oleh umat Hindu-Bali baik dalam ritual sehari-hari maupun pada hari-hari tertentu. Etnis Tionghoa-Bali penganut kepercayaan tradisi *China* ini biasanya mempersembahkan *canang* di meja-meja altar dewa dewi dan pada sudut-sudut ruangan tertentu yang dianggap sakral (gambar 1). Pemujaan tidak hanya difokuskan pada dewa-dewi dari tiga aliran kepercayaan, tetapi biasanya juga mengadopsi dewa-dewi dari kepercayaan Siwa-Buddha dan dewa-dewi atau tokoh sakral setempat. Selain itu, ritual *odalan* atau *pidalan* yang biasanya dilakukan oleh umat Hindu-Bali juga dilakukan oleh etnis Tionghoa-Bali untuk memperingati hari lahirnya dewa-dewi yang distanakan di dalam kompleks bangunan kuil Tri Dharma. Bahkan dalam ritual *odalan* ini, etnis Tionghoa-Bali akan mendekor kompleks bangunan Tri Dharma dengan *perjor* (bambu yang dihias dengan rangkaian janur) dan atribut tradisional *China* lainnya.



Gambar 1. *Canang* di meja altar  
Sumber: Hendrawan, 2019

### 3. Arsitektur kuil Tri Dharma

Kuil Tri Dharma adalah salah satu wujud ekspresi identitas budaya etnis Tionghoa yang signifikan. Selain sebagai fungsi bangunan peribadatan, kuil Tri Dharma juga difungsikan sebagai sarana kegiatan sosial-budaya, seperti untuk menyelenggarakan pengembangan budaya, upacara pernikahan, bahkan kegiatan komunitas atau paguyuban etnis Tionghoa. Sebagai salah satu kebijakan asimilasi di era Orde baru, kuil-kuil Tri Dharma di seluruh Indonesia berubah menjadi Vihara agar diakui sebagai tempat ibadat resmi oleh pemerintah Indonesia. Walaupun telah berubah menjadi Vihara, beberapa kuil Tri Dharma di Bali masih melaksanakan praktik ritual tradisional *China* secara tertutup sebatas lingkup keluarga atau komunitas.

Kebijakan asimilasi ini cukup jelas mengatur tentang pelarangan terhadap tampilan bangunan yang merepresentasikan arsitektur tradisional *China*, khususnya pada bangunan peribadatan etnis Tionghoa. Segala elemen-elemen tradisional *China* seperti papan nama kuil, patung-patung dewa-dewi, dan dekorasi lainnya terpaksa harus diturunkan dan disembunyikan. Bahkan peran pemerintah dalam kebijakan ini ditunjukkan dengan memberikan dana bantuan untuk pengembangan ataupun renovasi kuil. Salah satunya terjadi pada Tempat Ibadat Tri Dharma (TITD) Kong Co Bio atau dikenal sebagai Vihara Dharma Cattrra, dimana pemerintah daerah memberikan dana bantuan untuk membangun gerbang dan pagar dengan mengadopsi bentuk gerbang tradisional Bali dan mengkombinasikan dengan ornamen-ornamen yang merepresentasikan Agama Buddha. Penggunaan ornamen-ornamen tradisional *China* pada sebagian besar kuil-kuil Tri Dharma di Bali dimulai saat era Reformasi, dimana pemerintah Indonesia mulai merubah kebijakan terhadap etnis Tionghoa untuk mengekspresikan budaya tradisional mereka secara terbuka.

Wujud kreativitas budaya etnis Tionghoa-Bali pada kuil-kuil Tri Dharma di Bali ini dapat dilihat melalui pengadopsian altar Hindu-Bali atau yang lebih dikenal sebagai *pelinggih*. Pada dasarnya *pelinggih* dapat ditemukan pada pura atau rumah tinggal umat Hindu-Bali dan didesain dengan arsitektur tradisional Bali. Variasi *pelinggih* pada beberapa kuil Tri Dharma di Bali adalah berupa *pelinggih penunggun karang*, *pelinggih subandar*, atau *pelinggih* untuk menstantakan dewa-dewi tradisional *China* (gambar 2). Beberapa kuil Tri Dharma di Bali juga mengadopsi ornamen-ornamen tradisional Bali, seperti *kekarangan*, *pepalihan*, dan *pepatran* pada dinding yang dikombinasikan dengan ornamen dengan karakteristik tradisional *China* (gambar 3). Selain itu, *candi bentar* dan *kori* sebagai salah satu elemen arsitektur tradisional Bali yang digunakan sebagai gerbang (*pamedal/pamesuan*) dari dan ke dalam

komplek pura atau puri diadopsi ke dalam beberapa kompleks kuil Tri Dharma di Bali dengan kombinasi warna dan ornamen tradisional *China* (gambar 4).



Gambar 2. *Pelinggih Penunggun Karang* (kiri), *Subandar* (tengah), dan Dewa Dapur atau Dewa Zao Jun Gong (kanan)  
Sumber: Hendrawan, 2019



Gambar 3. Ornamen tradisional Bali pada dinding TITD Kong Co Bio  
Sumber: Hendrawan, 2019



Gambar 4. *Kori TITD Kwan Kong Bio*  
Sumber: Hendrawan, 2019

## KESIMPULAN

Eksistensi etnis Tionghoa di Bali sebagai kelompok masyarakat diaspora tidak terlepas dari isu-isu marginalisasi baik dalam konteks sosial maupun politik. Dalam hal ini, etnis Tionghoa-Bali melakukan rekonstruksi identitas budaya sebagai upaya untuk mempertahankan dan memelihara budaya leluhur melalui re-interpretasi budaya dan tradisi mereka sendiri, serta identifikasi dan negosiasi

terhadap budaya Bali. Upaya ini dilakukan oleh etnis Tionghoa di Bali melalui proses kreatif dalam memadupadankan budaya tradisional *China* dan Bali ke dalam aspek penggunaan nama, praktik ritual, dan arsitektur kuil Tri Dharma.

Melalui kajian postkolonialisme ini, dapat dibuktikan bahwa kesadaran kelompok minoritas di dalam menciptakan identitas budaya didasarkan pada persamaan budaya atau sejarah dengan kelompok mayoritas, disertai kesadaran kedua kelompok tersebut bahwa konsep universalisme tidak dapat diterapkan di lingkungan binaan yang multikultur dan di era globalisasi saat ini. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hall (1990) bahwa kebudayaan itu dinamis dan mengalir, sehingga identitas budaya itu *'not once-and-for-all'*, setiap subjek menawarkan perbedaan. Konsep dualisme bukan lagi tentang siapa yang unggul atau menonjol, tetapi lebih tentang toleransi terhadap proses interaksi dan komunikasi dari kebudayaan yang berbeda yang terjadi pada ruang transisi, yang kemudian menciptakan identitas baru, yaitu identitas hibrid.

## REFERENSI

- Ardika, I. W. 2009. *Blanjong: An Ancient Port Site in Southern Bali, Indonesia. Form, Macht, Differenz*. Göttingen: Universitätsverlag Göttingen.
- Butler, K. D. 2001. Defining Diaspora, Refining a Discourse. *Diaspora*, 10(2), pp 189-219.
- Chee-Beng, T. 2007. *Chinese Transnational Networks*, New York: Routledge
- Clifford, J. 1994. Diasporas. *Cultural Anthropology*, 9(3), pp 302-338.
- Cohen, R. & Sheringham, O. 2008. Introduction: Islands and Identities. *Diaspora*, 17), pp 1.
- Coppel, C. A. 1983. *Indonesian Chinese in Crisis*, Singapore: Oxford University Press.
- Coppel, C. A. 2002. The Indonesian Chinese: "Foreign Orientals", Netherlands Subjects, and Indonesian Citizens. In: Hooker, M. (ed.) *Law and the Chinese in Southeast Asia*. ISEAS–Yusof Ishak Institute.
- Dickinson, J. 2018. Post-colonial States, Nation Building and the (un)making of Diasporas. In: Cohen, R. & Fischer, C. (eds.) *Routledge Handbook of Diaspora Studies*.
- Hall, S. 1990. Cultural Identity and Diaspora. In: Rutherford, J. (ed.) *Identity: Community, Culture, Difference*. London: Lawrence and Wishart.
- Hauser-Schäublin, B. & Ardika, I. W. 2016. *Burials, Texts and Rituals-Ethnoarchaeological Investigations in North Bali, Indonesia*: Universitätsverlag Göttingen.
- Nordholt, H. S. 2010. *The spell of power: A history of Balinese politics, 1650-1940*: Brill.
- Papastergiadis, N. 2000. *The Turbulence of Migration*, Cambridge: Polity Press.
- Pasura, D. 2018. Multi-religious diasporas: Rethinking the relationship between religion and diaspora. In: Cohen, R. & Fischer, C. (eds.) *Routledge Handbook of Diaspora Studies*. Taylor & Francis Group.
- Rutherford, J. 1990. The Third Space. Interview with Homi Bhabha. In: Rutherford, J. (ed.) *Identity: Community, Culture, Difference*. London: Lawrence and Wishart.
- Said, E. W. 1994. *Culture and Imperialism*, London: Vintage.
- Said, E. W. 2003. *Orientalism*, London: Penguin Group.

Suryadinata, L. 2008. Chinese Indonesians in An Era of Globalization: Some Major Characteristics. ISEAS- Yusof Ishak Institute.

Suryadinata, L. 2014. Kebijakan Negara Indonesia terhadap Etnik Tionghoa: Dari Asimilasi ke Multikulturalisme? *Antropologi Indonesia*, 24.